

SISTEM PASAR BEBAS
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL
Tantangan dan Konsekuensi bagi Negara Indonesia

Oleh:
Sri Muryantini
Nunik Retno Herawati

Abstrak

Sistem pasar bebas, globalisasi, perdagangan bebas sampai saat ini sering menjadi berita utama dari berbagai media massa. Bahkan telah menjadi perbincangan yang hangat manakala ekspor tekstil Indonesia telah terkena proteksi dari pemerintah Amerika Serikat dan juga ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan Mobnas yang sangat kontroversial. Dalam tulisan ini tidak membahas masalah mobnas, namun membahas tantangan dan konsekuensi yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam sistem pasar bebas secara global.

Pendahuluan

Sejak disepakati pembentukan WTO (*World Trade Organization*) dalam pertemuan di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, perdagangan internasional mempunyai implikasi positif dan negatif. Implikasi yang bisa diamati yaitu: pertama bahwa perdagangan antar negara akan dilakukan dengan aturan yang lebih jelas serta dijamin oleh organisasi internasional yang mempunyai wewenang regulatif. Konsekuensi kedua adalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia ditekan untuk membuka pasar domestiknya bagi kekuatan negara-negara industri yang telah maju (Mohtar Mas'ood, 1994:vi). Padahal di sisi yang lain, negara-negara berkembang mempunyai kesulitan untuk mendapatkan akses pasar ke negara-negara maju. Sebagai contoh akses industri tekstil dan garmen Indonesia di Amerika Serikat.

Dari implikasi tersebut sebenarnya sistem pasar bebas merupakan suatu paradoks kepentingan yaitu antara kepentingan nasional dan internasional. Sistem pasar bebas di satu sisi menghendaki pemerintah melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada perekonomian internasional. Namun di sisi yang lain, pemerintah masih menghadapi berbagai

hambatan dalam negeri untuk menuju pada kemandirian. Dominasi dan kekuasaan internasional pada akhirnya ikut menentukan kebijakan yang akan diambil. Persoalan yang muncul adalah kepentingan apa yang mendasari pemerintah Indonesia ikut terlibat dalam sistem pasar bebas itu ?.

Thee Kian Wie memandang bahwa kehadiran WTO memang dikehendaki negara-negara maju untuk menghambat negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam proteksi, subsidi dan sikap diskriminatif dalam perdagangan luar negeri. Padahal proteksi dan subsidi sebenarnya bukan hanya terjadi di negara berkembang saja, namun juga terjadi di negara maju termasuk Uni Eropa yang masih membentengi sektor pertaniannya. mungkin karena kepentingan untuk akses pasar tersebut yang mendasari sistem pasar bebas dilaksanakan, di samping kepentingan politik lain.

Fenomena ekonomi politik di atas, menggambarkan bahwa sistem perdagangan bebas membawa perbenturan kepentingan antara negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan negara-negara industri maju. Di satu sisi, liberalisasi perdagangan akan membawa dilema bagi negara-negara yang lemah dan belum siap dalam sektor industri yang sebagian besar masih mendapatkan subsidi pemerintah. Di sisi lain, sistem perdagangan bebas merupakan satu pilihan yang tidak bisa dihindari dan justru lebih menguntungkan negara-negara industri maju. Arief Budiman menyebut sistem perdagangan bebas itu sebagai bentuk neo imperialis dengan kekuatan utama daya saing dalam pasar bebas (Martin K., 1993).

Fenomena yang menarik perhatian dan dicoba dianalisa adalah: *pertama* Apakah yang dimaksud sistem pasar bebas dan bagaimana terjadinya ?. *Kedua* Apakah yang dihasilkan dalam Kesepakatan Uruguay ?. *Kepentingan* apa yang mendasari Indonesia terlibat didalamnya ?. *Ketiga*, Hambatan dan kendala apa yang dihadapi Indonesia dalam pasar bebas ?. *Konsekuensi* apa yang akan ditimbulkan sistem pasar bebas bagi Indonesia ?.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional akan dicoba untuk menggambarkan dan menganalisa dengan memberikan contoh perkembangan industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan bebas itu. Alasan digunakannya pendekatan ekonomi politik internasional adalah *pertama*, bahwa ekonomi politik nasional pada dasarnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh ekonomi politik internasional. Alasan *kedua* adalah kebijakan ekonomi (khususnya perdagangan dan industri) nasional pada akhirnya juga ditentukan oleh aturan perdagangan dunia yang mengatur sistem ekonomi internasional.

Perspektif Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional

Asumsi dasar dari perspektif liberal adalah bahwa untuk meningkatkan kekayaan nasional, individu dibiarkan berjalan secara bebas dan tidak dibatasi dalam ekonomi domestik dan internasional (Mohtar Mas' oed, 1994:22). Kaum liberal yakin bahwa hubungan ekonomi internasional bersifat harmonis dan menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Dalam sistem ini semua orang baik yang kuat maupun yang lemah harus berkompetisi secara bebas. Pertimbangan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dijadikan dasar bagi semua produk dalam perdagangan internasional. Untuk itu setiap negara harus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk bila ingin memenangkan persaingan dagang antar negara. Kaum liberal yakin bahwa spesialisasi produksi secara internasional akan menghasilkan produk dengan efisiensi yang tinggi.

Menurut perspektif liberal, peranan negara seharusnya terbatas. Peranan yang utama ada pada individu/swasta yang senantiasa berperilaku secara rasional. Intervensi pemerintah yang besar dalam ekonomi justru akan membatasi pasar dan secara potensial tidak menguntungkan bagi

4

perdagangan internasional. Menurut logika sistem ini, dalam kompetisi bebas tidak ada perlindungan terhadap yang lemah, karena kalau yang lemah dilindungi maka akan mengganggu mekanisme pasar bebas. Menurut sistem ini, kalau si lemah dilindungi, dia selamanya akan lemah. Kompetisi bebaslah yang akan membuatnya belajar dan menjadi kuat. Perlindungan bagi yang lemah dianggap sebagai campur tangan politik terhadap ekonomi dan ini bertentangan dengan prinsip pasar bebas.

Kebijakan dengan mengurangi proteksi dan subsidi pemerintah merupakan cara untuk memperbaiki akses pasar. Peranan pemerintah seharusnya lebih diarahkan untuk menyediakan pondasi bagi mekanisme pasar, misalnya dengan menjamin keamanan.

Persoalan lain adalah mengapa sistem pasar bebas itu muncul ?. Terdapat beberapa alasan antara lain karena perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Alasan lain adalah karena ketergantungan negara-negara pinggiran pada kapital asing dan semakin dominannya kekuasaan negara-negara pusat terhadap negara-negara pinggiran tersebut (Amir Effendi, 1991:131).

Kesepakatan Putaran Uruguay

Putaran Uruguay adalah perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka GATT yang dilancarkan sejak September 1986. Perundingan multilateral perdagangan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka dan bebas. Ada tiga prinsip dan aturan perdagangan antar bangsa dalam kerangka GATT (Soedradjad Djiwandono, 1992:181). *Pertama*, bahwa hubungan perdagangan antar bangsa didasarkan prinsip resiprositas, artinya perlakuan timbal balik antar negara dengan mitra dagangnya. *Kedua*, Prinsip perlakuan sama atau nondiskriminasi (Prinsip Most Favored Nations) *Ketiga*, prinsip transparency, artinya perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara secara

transparan dapat diketahui mitra dagangnya. Implikasinya prinsip perdagangan bebas tersebut akan mempunyai dampak politis terhadap kedaulatan suatu negara. Yaitu ditandai oleh semakin kaburnya batas kedaulatan dan integritas teritorial oleh intervensi kekuatan asing.

Pada dasarnya Putaran Uruguay diselenggarakan karena dirasakan perlunya diadakan perubahan mendasar secara global mengenai aturan main perdagangan dunia. Putaran Uruguay pada dasarnya dapat dipandang sebagai bentuk usaha untuk memaksakan prinsip pasar bebas ke negara-negara berkembang dengan menghilangkan semua bentuk proteksi baik terhadap barang industri, jasa dan hak paten. Kecenderungan meningkatnya proteksionisme pada dasawarsa 80-an inilah yang membuat Putaran Uruguay diadakan di Puntadel Este, Uruguay tahun 1987.

Hasil Kesepakatan Putaran Uruguay sebenarnya dapat dilihat dari aspek positif dan negatif, meski bagi negara berkembang aspek negatif lebih besar kadarnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Putaran Uruguay telah memaksa negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk melakukan penyesuaian secara serius di bidang perdagangan, industri maupun pertaniannya. Kondisi ini bisa mengakibatkan terjadinya dislokasi di banyak sektor terutama perusahaan-perusahaan dan petani-petani kelas kecil dan menengah.

Beberapa hasil kajian menunjukkan banyak masalah terjadi di negara-negara berkembang setelah adanya kesepakatan Putaran Uruguay. Kondisi ini disebabkan oleh, pertama, Kesepakatan Putaran Uruguay merupakan kesepakatan yang tidak balance karena manfaat dan cost terjadinya liberalisasi lebih dinikmati negara-negara industri yang sudah maju. Kedua, Kesepakatan Putaran Uruguay terpaksa disetujui negara-negara berkembang karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Kebutuhan dana bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang telah memaksa mereka memenuhi keinginan negara industri seperti Amerika Serikat dan

Jepang. Ketiga, Sistem GATT atau WTO yang didasarkan hubungan timbal balik sebenarnya lebih cocok diterapkan dalam hubungan antara negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi relatif sama.

Namun secara umum ada beberapa keuntungan yang bisa dinikmati negara-negara berkembang dari perdagangan bebas. Antara lain adanya *ruled based system* (sistem yang berdasarkan Undang-undang) yang lebih kuat, wewenang yang lebih besar pada WTO untuk menangani sengketa-sengketa, serta adanya dorongan yang lebih kuat untuk mengadakan reformasi di dalam negeri.

Kesepakatan Putaran Uruguay tersebut ternyata juga dapat membawa dampak positif bagi industri di Indonesia. Kebijakan regulatif WTO membuat Pemerintah Indonesia mengurangi melakukan kebijakan yang memberikan subsidi dan cenderung protektif¹⁾. Kebijakan ini memaksa industri di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas barang dengan daya saing yang tinggi dan memiliki keunggulan komparatif. Selain itu dari Kebijakan Regulasi WTO tersebut, industri tekstil dan garmen Indonesia bisa memaksa penghapusan sistem Kuota dan penghapusan hambatan non-tarif yang dilakukan negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat.

Hasil-hasil Putaran Uruguay jelas memiliki implikasi yang amat mendalam bagi masa depan ekonomi dunia dan lingkungan global, bagi hubungan-hubungan kekuasaan antara berbagai negara dan bagi kedaulatan serta pola pembangunan di negara-negara berkembang. Di bawah slogan "Pasar Bebas", "Perdagangan Bebas", "Deregulasi", "Privatisasi atau Swastanisasi" dan "Liberalisasi" menuntut maksimalisasi kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada

¹⁾ Subsidi merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau organisasi perdagangannya dengan tujuan untuk memperkuat posisi persaingan. Sedangkan proteksi merupakan tindakan pemerintah (bidang tarif dan non-tarif) yang bisa mengakibatkan kenaikan biaya atas barang impor dengan tujuan untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri.

perusahaan transnasional untuk beroperasi sementara pada saat yang sama mereka menuntut minimalisasi campur tangan pemerintah untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi atau untuk mengatur sepak terjang dan berbagai dampak kegiatan perusahaan tersebut (Martin, 1993:45).

Di antara dua pesaing yang berimbang, "Perdagangan Bebas" mungkin akan memuaskan kedua belah pihak, di samping itu akan membawa hasil yang adil maupun manfaat yang sama. Tetapi apabila salah satu dari kedua pihak itu jauh lebih kuat daripada pihak lain, manfaatnya jelas tidak akan terbagi secara adil bahkan yang terjadi bahwa pihak yang lemah sama sekali tidak akan mendapatkan apa-apa atau mungkin malah harus menderita kerugian.

Kesepakatan Putaran Uruguay di atas, menunjukkan bahwa kepentingan politik negara-negara industri lebih mendominasi kepentingan ekonomi dan politik dari negara-negara berkembang. Berbagai isu-isu dimunculkan negara maju seperti standar buruh, kebijakan investasi, kebijakan persaingan, dampak lingkungan dan korupsi / suap dalam rangka pencapaian kepentingannya. Liberalisasi sektor teknologi informasi merupakan kepentingan yang ingin dicapai negara-negara industri maju dengan penghapusan tarif bagi produk-produk teknologi informasi dan ditegakkannya hak milik intelektual dalam perdagangan multilateralisme.

Meskipun aspek yang ditimbulkan hasil Putaran Uruguay lebih menguntungkan negara-negara industri maju, namun Indonesia sebagai negara berkembang juga ikut terlibat di dalamnya. Kepentingan apa yang mendasari keikutsertaan Indonesia dalam Putaran Uruguay merupakan satu pilihan yang tidak bisa tidak dihindari. Pada masa sekarang tidak ada satu negara manapun yang dapat mengisolasi diri dari keadaan luar secara murni, khususnya bagi negara-negara yang masih memakai "Model Pertumbuhan" sebagai landasan bagi pembangunannya. Keikutsertaan Indonesia dalam forum

internasional di bidang perdagangan pada dasarnya menunjukkan kegiatan lobbying di negara tujuan ekspor untuk mempertahankan maupun untuk membuka pasar baru. Hal ini didasarkan karena beberapa hasil ekspor non migas Indonesia ternyata menemui hambatan tarif dan non-tarif dari negara-negara maju. Kasus yang bisa dijadikan contoh adalah perdagangan tekstil dan pakaian jadi Indonesia yang masih dibatsi eksportnya berdasarkan ketentuan MFA (Multifibre Arrangements).

Selain alasan di atas, sebagai negara yang eksportnya kecil, upaya penyelesaian lewat GATT merupakan upaya efektif daripada harus menghadapi negara raksasa secara bilateral. Karena itu dengan makin terbuka, adil dan kuatnya kelembagaan GATT dan peraturannya dipatuhi oleh semua negara secara sama, maka kepentingan Indonesia sebagai pemain baru dalam pasar duna untuk produk-produk manufaktur akan lebih terjamin.

Pembentukan blok-blok perdagangan yang pada dasarnya merupakan perwujudan pembentukan kawasan perdagangan bebas juga ikut mempengaruhi kepentingan Indonesia dalam Putaran Uruguay. Hal ini disebabkan karena kerjasama regional ini sering cenderung melahirkan tindakan proeksi terhadap negara di luar anggotanya. Sebagian menyatakan bahwa keadaan tersebut akan mengurangi akses pasar bagi negara-negara di luar suatu blok atau kerjasama regional.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kepentingan politik pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dan akan mempengaruhi kepentingan ekonomi suatu negara. Keterkaitan ekonomi dan politik bisa dilihat dari maksud GATT untuk menata kembali aturan hukum dan kelembagaan internasional yang mengatur pertukaran barang, hak milik intelektual, inventasi asing dan jasa demi memajukan kapitalisme global dalam masa transformasi ekonomi yang menyeluruh akibat perkembangan cepat teknologi (Mohtar Mas'oed, 1994:62).

Analisa Perekonomian Indonesia

Ekonomi tidak bisa tumbuh terus tanpa batas. Kehidupan ekonomi selalu ditandai fluktuasi dengan meningkatnya kegiatan ekonomi sampai titik puncak sekaligus merupakan titik balik. Gejala pasang surut kegiatan ekonomi secara periodik ini disebut *business cycle* (Kwik kian Gie, 1994:31). Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi, khususnya dalam perdagangan internasional.

Faktor yang penting mungkin disebabkan adanya fluktuasi harga migas yang naik dua kali lipat pada tahun 1979/1980, lalu menurun pada tahun 1982 dan anjlok pada tahun 1986. Dan setelah harga migas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia sebagai penghasil devisa menjadi tidak stabil. Sebagai kompensasinya pemerintah Indonesia kemudian mendorong peranan sektor non migas.

Dengan mengandalkan penerimaan ekspor non migas, sumber pembiayaan pembangunan Indonesia menjadi terbatas karena dari ekspor non migas juga mengalami pasang surut. Sebagai gambaran ekspor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (TPT) mengalami fluktuasi.

Terbatasnya sarana pembiayaan yang tersedia (dalam bentuk tabungan masyarakat serta penerimaan devisa hasil ekspor) dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan investasi membuat pemerintah Indonesia tergantung pada pinjaman dan bantuan luar negeri. Globalisasi ekonomi sekarang ini ternyata justru semakin menguatkan ketergantungan atau dependensi finansial Indonesia terhadap negara-negara maju.

Tidak adanya kepastian hukum yang mengatur kehidupan politik maupun ekonomi di Indonesia, ternyata mempunyai implikasi yang luas dan lebih jauh bisa mengakibatkan fluktuasi di bidang ekonomi secara tidak pasti dan tidak tetap. Implikasi yang dirasakan khususnya terhadap investasi asing yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Hukum mempunyai peranan yang besar dan penting

dalam transaksi bisnis dalam era globalisasi. Hal ini dikarenakan keuntungan yang akan diperoleh dan kerugian yang akan dihindari. Di sini aspek hukum dapat menentukan realisasi investasi yang terjadi dan secara luas sangat menentukan ekonomi Indonesia. Tidak adanya kepastian hukum pada akhirnya akan membawa ekonomi Indonesia menjadi mahal karena para pengusaha khususnya investor asing memasukkan "cadangan resiko gejolak kebijaksanaan ekonomi" dalam nilai transaksi yang terjadi.

Adanya tuduhan "dumping" terhadap berbagai produk perusahaan Indonesia semakin mempersulit pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor non migas dan menambah pemasukan devisanya. Tuduhan di atas menyebabkan barang-barang ekspor Indonesia dikenakan bea masuk tambahan sebesar "margin dumping" yang dituduhkan. Tuduhan dumping ini pada dasarnya merupakan satu bentuk proteksionisme yang dilakukan negara-negara industri maju terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri Indonesia

Dengan mengamati secara global permasalahan ekonomi di atas, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya peningkatan ekspor non migas Indonesia. ~~Pertama,~~ perkembangan dan hubungan ekonomi makin kurang menentu dengan persaingan tajam. *Kedua,* kemajuan teknologi yang berkembang di negara-negara maju memungkinkan produksi dilakukan secara efisien. Padahal di negara-negara berkembang seperti Indonesia, secara umum produksi masih mengandalkan pada faktor tenaga kerja. *Ketiga,* timbulnya blok-blok perdagangan yang cenderung menimbulkan proteksionisme di antara anggota blok perdagangan sehingga akan mempersempit peluang pasar. Dari tantangan di atas, diharapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri Indonesia yang akan dilaksanakan dalam menghadapi "pasar bebas" bisa

menumbuhkan industri dalam negeri yang efisien dengan memiliki comparative advantage.

Di samping tantangan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam menghadapi "sistem pasar bebas". *Pertama*, produk manufaktur yang dihasilkan Indonesia pada umumnya sama dengan yang dihasilkan negara berkembang lainnya. Hal ini akan meningkatkan persaingan yang makin tajam. *Kedua*, masih lemahnya penguasaan informasi pasar oleh pengusaha menengah dan kecil. *Ketiga*, ekonomi

Sebagai ilustrasi tantangan dan kendala di atas, penulis mencoba mengamati ekspor industri tekstil dan produk tekstil dalam menghadapi sistem pasar bebas. Perkembangan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada awalnya diandalkan menhadi mesin devisa, karena selama tiga tahun (1989 hingga 1991) mencetak pertumbuhan rata-rata di atas 40%. Namun sejak tahun 1993, ekspor TPT cenderung menurun.

Ada beberapa faktor yang membuat industri TPT Indonesia kedodoran. *Pertama*, karena adanya persaingan yang semakin ketat. Untuk menerobos pasar ekspor, Indonesia tidak hanya berhadapan dengan pesaing tradisional seperti RRC, Korea Selatan dan Thailand, tetapi juga pendatang baru seperti India dan Pakistan. Di sisi lain, negara-negara industri mengembangkan teknologi baru dalam produksi TPT. Keunggulan ini tentu saja tidak bisa disaingi industri TPT negara berkembang yang hanya mengandalkan upah buruh murah.

Faktor *kedua* yaitu adanya tudingan dari Amerika Serikat, Masyarakat eropa, Kanada dan Australia tentang dumping yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Eropa akhirnya menjatuhkan sanksi dengan mengenakan bea masuk anti dumping 11,4% - 24,6%. Pengenaan bea tambahan ini langsung terasa dampaknya pada penerimaan devisa negara.

Selain faktor-faktor di atas, ketentuan dalam MFA (*multifibre arrangement*) membuat perdagangan tekstil Indonesia mengalami hambatan dan kendala yang tidak ringan. Sebab dari ketentuan MFA ini, memungkinkan suatu negara menerapkan berbagai macam proteksi, mulai dari kuota hingga tarif bahkan hambatan non-tarif untuk melindungi industri tekstil dalam negeri negara pengimpor (negara maju) dari ancaman tekstil dan pakaian jadi dari negara berkembang seperti Indonesia. Dari kenyataan itu, sebenarnya MFA nyata-nyata melanggar aturan GATT, terutama prinsip non diskriminasi. Oleh karena alasan untuk menghilangkan bentuk proteksi di atas, Indonesia mempunyai kepentingan dalam Putaran Uruguay. Namun dalam kenyataannya, liberalisasi industri tekstil dan pakaian jadi cenderung ditunda oleh negara-negara maju. Hasil Putaran Uruguay ternyata tidak memprioritaskan liberalisasi TPT, tetapi justru memberikan prioritas utama pada persoalan perlindungan Hak Milik Intelektual, Jasa, Investasi dan berbagai subsidi yang merupakan kepentingan negara-negara industri maju.

Di sini terlihat bahwa bahwa industri tekstil telah dijadikan kekuatan bargaining dari negara-negara industri maju untuk memaksa negara-negara berkembang menerima isu-isu yang dijadikan prioritas kepentingannya. Ada beberapa isu yang ingin dicapai negara industri maju seperti Amerika Serikat, yaitu Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*), jasa dan investasi.

Di lain pihak, Putaran Uruguay menunjukkan bahwa negara-negara berkembang gagal dalam upaya mereka mendesak negara-negara maju untuk mempercepat liberalisasi di bidang yang menjadi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia. Tampaknya sulit untuk mengharapakan political good will dari negara-negara maju. Negara berkembang harus memiliki kekuatan untuk dijadikan bargaining dalam menghadapi negara-negara industri maju.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, ada beberapa kebijaksanaan ekonomi di bidang perdagangan luar negeri yang harus ditempuh Indonesia dalam menghadapi sistem pasar bebas yang akan segera berlaku, yaitu:

1. Keikutsertaan dalam sistem pasar bebas, pada dasarnya merupakan suatu pilihan yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini tentunya akan membawa implikasi ekonomi dan politik -baik sebagai tantangan dan kendala- bagi industri dalam negeri. Industri dengan efisiensi tinggi dan memiliki comparative advantage sangat diperlukan dalam menghadapi sistem pasar bebas tersebut.
2. Pemerintah diharapkan makinmemainkan peran sebagai fasilitator, pemberi dorongan dan bimbingan kepada dunia usaha. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi harus dilanjutkan. Kebijakan ini dilakukan untuk menghilangkan distorsi akibat prosedur dan intervensi yang berbelit-belit yang bisa menghambat kegiatan perekonomian supaya sesuai mekanisme pasar.
3. Perlu dukungan upaya internasional untuk menjaga agar perdagangan tetap berjalan secara global. Pemerintah Indonesia dituntut untuk aktif pada berbagai forum internasional di bidang perdagangan sebagai langkah memperoleh akses ke semua pasaran di dunia.
4. Meningkatkan ekspor non migas dengan melanjutkan dan meningkatkan usaha diversifikasi barang secara horisontal dan vertikal serta meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri seperti perbaikan mutu barang, menekan biaya produksi dan pemasaran demi meningkatkan efisiensi produksi. Diversifikasi secara horizontal dimaksudkan untuk menggali berbagai jenis produk baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Sedangkan diversifikasi secara vertikal dimaksudkan untuk mengembangkan atau menciptakan produk-produk baru dengan tetap mengolah atau mendasarkan pada bahan-bahan yang ada.

5. Kebijakan di atas juga harus selalu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia baik pada tingkat aparatur negara (sebagai pembuat kebijakan) maupun masyarakat (sebagai pelaksana kebijakan) karena globalisasi dalam bidang ekonomi akan berdampak adanya penetrasi budaya barat yang kemungkinan bisa mengancam identitas dan ketahanan nasional.

Daftar Pustaka

- Divine, Pat, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, Terjemahan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995.
- Djiwandono, J. Soedradjad, *Perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1992.
- _____, "Perekonomian Indonesia dan Era Blok Perdagangan: Tantangan dan Peluang Baru", *Prisma*, No. 4, Tahun XXII, LP3ES, Jakarta, 1993.
- Gie, Kwik Kian, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Peng, Martin Khor Kok *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1993.
- Siregar, Amir Effendi, Ed., *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-esai Terpilih*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.

Daftar Riwayat

Sri Muryantini, Alumnus Jurusan Hubungan Internasional Jember. Gelar S2 diperoleh dari Ilmu Politik, Pascasarjana, UGM. Mulai 1994 menjadi Staf Pengajar di Jurusan HI UPN "Veteran" Yogyakarta.

Nunik Retno Herawati, Alumnus Jurusan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang. Gelar S2 diperoleh dari Ilmu Politik, Pascasarjana, UGM. Mulai 1998 menjadi Staf Pengajar di Jurusan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang.